

MENDJELANG REPETA-IITERBATAS

Beberapa pikiran mengenai aspek2  
sosial dalam proses perentjanaan.

oleh

SOEDJATROKO

PENDAHJULUAN

Dalam menghadapi usaha pembangunan kita tidak dapat mengelakkan kesimpulan bahwa masalah terbesar, masalah paling urgent tetapi juga masalah paling sulit, ialah masalah kesempatan kerdja. Masalah ini ternyata merupakan masalah pokok yang akan menguasai kestabilan politik serta suasana dan dynamik perkembangan Indonesia seterusnya. Sebagai gambaran yang kasar dapat dikatakan bahwa dinegeri kita tambahan "labor force" setiap tahun ialah 1,8 sampai 3% daripada jumlah total tenaga kerdja. Ini berarti bahwa mulai tahun 1970 harus ditjari 1 sampai 1½ djuta kesempatan kerdja baru setahun. Ahli ekonomi ternama Jepang, Saburo Okita, pernah mengadakan suatu perhitungan kasar yang menunjukkan bahwa hanya dengan suatu "growth rate" sebesar 10% suatu negara yang sedang berkembang dapat menguasai - bukan mengatasi - masalah unemployment-nya, djika usaha itu didasarkan pada sektor industri modern.

Terakhir bahwa dengan ladjunya pertumbuhan ekonomi yang kita rentjanakan untuk REPETA-II jaitu sebesar 6 atau 7%, kita tidak dapat mengharapakan bahwa masalah kesempatan kerdja dapat ditampung dengan memuaskan apabila kita tidak mempertimbangkan kesempatan kerdja didaerah pedesaan.

Disamping itu terang juga bahwa sektor employment ini didalam planning kita tidak dapat dianggap dan diperlakukan sebagai suatu sektor tertentu disamping sektor2 lain, melainkan bahwa masalah kesempatan kerdja ini - disamping "growth rate" yang hendak ditjapai - harus merupakan sudut penglihatan integral daripada segala permasalahan pembangunan. Demikianlah misalnja segi kesempatan kerdja ini akan harus mempengaruhi diantaranya:

- a) perumusan politik industrialisasi kita (sampai dimana Pemerintah bersedia memberi prioritas kepada industri2 yang labor intensive, sampai dimana pemerintah bersedia memberi preferensi kepada production design yang labor intensive,

- b) perumusan pembangunan daerah pedesaan (sampai dimana mekanisasi pertanian mempersulit atau mempermudah masalah kesempatan kerja ini).
- c) perumusan kebijaksanaan import, credit dan bea-tjukai sebagai manifestasi daripada imbang yang dikehendaki oleh pemerintah antara harga mesin dan harga buruh yang dianggap optimal untuk kondisi di Indonesia.
- Begitupun Research and Development policies perlu ditunjukkan kepada masalah employment promotion ini. Ujikalau dipikir bahwa masalah kesempatan kerja juga dipengaruhi oleh politik pendidikan kita maka dapat dikatakan bahwa didalam planning untuk REP-LITA-II hampir semua sektor pembangunan memang harus ditinjau rentjannya dari sudut employment ini.

Angka2 unemployment untuk benua Asia menunjukkan pada umumnya suatu kenaikan, biarpun ada pula kenaikan didalam tingkat industrialisasi. Keadaan ini meniadakan harapan lama bahwa dengan meningkatnya industrialisasi, maka pengangguran akan hilang dinegara-negara yang sedang berkembang. Maka perlulah kita perkerbankan garis2 kebijaksanaan lain. Lebih lagi, karena didalam pemikiran kita tentang hari depan, kita tidak dapat mengkesampingkan kesadaran bahwa Indonesia 30 tahun lagi akan mempunyai jumlah penduduk yang dua kali lipat. Dan bahwa program keluarga berencana betapa baikpun hasilnya tidak akan dapat menfegah hal itu, karena ia akan memerlukan waktu lebih lama sebelum dia dapat rentjai stabilisasi jumlah penduduk.

Kedua pertimbangan ini memberikan suatu urgensi yang sangat besar pada masalah unemployment ini, djika kita hendak menghindari suatu malapetaka besar-besaran 10-20 tahun lagi. Memang tujuan daripada usaha planning kita hendaknya bukan sekedar mengedjar suatu "growth rate" yang tinggi, melainkan untuk melatakan landasan2 yang akan merujukinkan 250 juta bangsa Indonesia untuk hidup aman dan sentosa.

#### STRATEGI REP-LITA-II

Waktu REP-LITA ke-I setjara tegas membatasi diri dan memusatkan perhatian kepada produksi pertanian dan rehabilitasi infra-struktur dengan mengkesampingkan setjara sadar berbagai harapan dan tuntutan masyarakat lainnya, maka keputusan itu umumnya memang diterima sebagai satu2nja pilihan yang benar. Namun tidak dapat diharapkan bahwa didalam REP-LITA ke-II tuntutan

dan harapan2 ini akan dapat dikesampingkan untuk 5 tahun lagi.

#### DASAR STRATEGI REPELITA-II

1. Maka REPELITA ke-II sebaiknya harus memperluas baik konsepsi pembangunan maupun landasan sosialnya. Masalah "employment" tidak lain satu segi daripada pengluasan itu.
2. REPELITA-II juga akan harus menampung persoalan2 yang telah timbul sebagai akibat daripada kemajuan2 yang telah ditjapai dalam rangka PELITA Pertama.
3. REPELITA ke-II akan harus mengadakan suatu evaluasi daripada kemajuan yang telah ditjapai itu, harus mengadakan identifikasi daripada kekurangan dan kegagalan. Dan yang lebih penting lagi REPELITA ke-II akan harus dapat mengadakan koreksi pada jurusan pembangunan kita, dimana perkembangan2 yang tidak disengadja sebagai akibat kemajuan yang telah ditjapai itu telah menjelewengkan proses pembangunan dari tracee-nja.

Derikianlah harapan2 yang terdapat dikalangan luas mengenai REPELITA ke-II. Dalam pada itu pemerintah tidak akan mempunyai tjukup dana dan daja untuk menanggulangi semua persoalan itu dan untuk memperhatikan semua golongan masyarakat. Dalam membatasi diri sesuai dengan kemampuannya, maka mau tidak mau pemerintah dalam merumuskan REPELITA-II, harus menanjakan kepada dirinya sendiri 2 pertanjaan: pertama, golongan2 mana diperlukan dukungan dan partisipasinya untuk mempertahankan momentum daripada usaha pembangunan kita, kedua, group2 mana dianggap penting dalam usaha pengamanan politis daripada pembangunan kita (supaja tidak mengatjaukan). Dalam hubungan ini perlu dibitjarkan masalah pemuda, golongan pengusaha, golongan intelligensia (Tjendekiawan) serta terbenkjalainja sumber2 intellektuil, golongan demobilisan, apparatuur negara termasuk perusahaan2 negara, dan disamping itu masalah2 keadilan-sosial, organisasi sosial termasuk serikat sekerdja dan koperasi, masalah2 ekonomi politik dan akhirnya persoalan gaja dan nada REPELITA ke-II.

I. MASALAH KEPEMUDAAN

Golongan pertama yang patut mendapat perhatian khusus dalam perentjanaaan REPELITA ke-II agaknya ialah golongan Pemuda. Perlu disadari bahwa sedjak beberapa tahun lebih dari separoh penduduk Indonesia ialah dibawah umur 17 tahun. Memang betul bahwa pada dewasa ini belum ada tanda2 djelas tentang suatu krisis terbuka dikalangan pemuda, namun toh sudah ada tjukup tanda2 bahwa persoalan mereka itu mulai mendjadi urgent. Sedjalah2 pengangguran, iseng frustrasi skepticis-me dan rasa pengasingan terhadap usaha2 konstruktup, sudah tjukup banyak, baik dikota-kota besar maupun dikota ketjil2. Sekali gang2 anak nakal terdjerumus kedalam aktivisme kriminil dan mulai menimbulkan suatu masaalah keamanan dikota-kota, maka pada azasnja pintu kearah kekerasan politik terbuka. Political violence itu tidak perlu berorientasi komunis namun bisa ditunggangi komunis. Seperti diberbagai negara berkembang, termasuk di Amerika Latin dan djuga di Ceylon, maka orientasi ideologis sering bersifat utopis anarchistis belaka. Betul djuga bahwa gerakan2 terror politik type Tupamaros tidak merupakan antjaman yang serius untuk kekuasaan politik yang ada, namun lama2 toh banyak dana dan daja harus digeser untuk menurpas gerakan2 sematjam itu, dan bagaimanapun djuga perkembangan sematjam itu tidak baik untuk suatu perkembangan politik yang sehat. Maka sangat perlu untuk mengambil langkah2 preventip.

Disamping melihat kepada golongan pemuda sebagai suatu golongan yang dapat menimbulkan matjam2 kesusahan, sebaliknya sangat perlu pula mereka djug dilihat sebagai suatu sumber kemampuan untuk pembangunan yang dapat dan harus dikerahkan. Sebenarnja kedua persoalan ini satu pangkalnja. Setiap program yang hanya berusaha supaya mereka tidak ngebut atau membikin keonaran di-djalan-djalan raja, yang hanya bermaksud untuk "bezighouden" mereka, akan gagal. Pada pokoknja para pemuda mentjari suatu kesibukan yang dapat memberi arti dan arah kepada kehidupan mereka. Maka yang diperlukan agaknya ialah suatu usaha yang setjara tegas menghubungkan peranan pemuda dengan tudjuan2 pembangunan bangsa, dengan segala kesulitan, kesempatan dan tantangan2nja. Dalam hubungan ini sebaiknja semua program2 yang menjangkut pemuda yang sekarang didjalankan dengan perantaraan berbagai departemen dan lembaga di-

tinjau sebagai keseluruhan (termasuk Pramuka, BUTSI, olah-raga, kesenian, kerajinan tangan, training- dan extension programs, program2 untuk drop-outs, program pembangunan desa, program transmigrasi dan sebagainya) dengan maksud untuk mengintensifkan penglibatan para pemuda, dan persjajaran untuk berangsur-angsur menuju kesuatu Korps Pemuda Pembangunan (National Youth Service).

## II. MASALAH ENTREPRENEUR INDONESIA

Golongan kedua yang memerlukan perhatian khusus ialah golongan entrepreneur Indonesia asli. Biar pun eksperimen2 lama untuk mempertjepat perkembangan golongan swasta ternyata sangat tinggi biayanya dan lagi pula kurang efektif, dan biar pun golongan swasta yang ada sekarang pun masih banyak kelemahannya, semuanya ini tidak berarti bahwa eksperimentasi2 tidak perlu diteruskan.

### Peranan swasta nasional

1. Biar pun golongan ini masih ketjil mereka turut mempengaruhi suasana politik dan dukungan mereka mempunyai arti simbolis yang penting juga bagi masyarakat umum dalam sikapnya terhadap KEMERITA ke-II.
2. Rula djikalau pada golongan swasta ini tidak terdapat keptjajaan bahwa kesempatan2 baru bagi mereka tidak turut bertambah sesuai dengan kesempatan2 yang terbuka bagi perusahaan asing, maka dapat dibayangkan bangkitnja kembali suatu nasionalisme ekonomi yang pitjik yang dapat membahayakan politik pemerintah terhadap modal asing.
3. Keterbelakangan daripada golongan swasta pribumi dapat menimbulkan kembali reaksi2 yang tidak sehat terhadap minoritas2 yang memang lebih sanggup memanfaatkan kesempatan2 baru. Memang benar bahwa kebidjaksanaan2 kredit investasi merupakan bantuan yang berarti bagi perkembangan swasta, namun pemberian kredit investasi yang agak besar kepada swasta pribumi masih djarang sekali terdjadi. Sebenarnya masih berbagai hal yang dapat dikerdjakan untuk merangsang timbulnja suatu golongan swasta Indonesia yang djauh lebih besar djumlahnja dan yang lebih tinggi kemampuannya.

### Langkah2 yang perlu diambil

Berbagai negara Amerika Latin telah memperkembangkan program2 dan lembaga2 untuk keperluan itu dengan hasil yang sangat baik.

- 1) Suatu "Lemhanas untuk Pembangunan" yang mengadakan dialog antara pengusaha, pegawai negeri senior, perwira tinggi, tjendekiawan, tentang masalah konkrit dibidang pembangunan, ternyata merupakan suatu sendjata ampuh dalam meningkatkan kemampuan bersama dinegara-negara itu. Banjak yang masih dapat dikerdjakan dalam menghubungkan setjara lebih sistematis golongan swasta dengan kesempatan2 baru yang timbul karena program investasi pemerintah, maupun asing.
- 2) Suatu Kantor Penjuluhan Pengusaha (Business Information Center) dapat menjalankan peranan yang sangat berguna dibidang ini.
- 3) Juga dibidang perkembangan skill dan efisiensi: dipertjepatnja berdirinja Bank2 Pembangunan Daerah ditambah dengan suatu re-orientasi pendidikan ekonomi perusahaan di universitas2 sehingga lebih mampu melajani keperluan dunia pengusaha Indonesia (termasuk perhatian yang lebih besar kepada masalah modernisasi perusahaan2 pra-modern yang dimana-mana sudah terdapat di Indonesia), dan disertai pula oleh suatu usaha pengembangan "internal market" yang tjukup besar dengan menindjau kembali tarip2 pengangkutan interinsuler, semuznja akan dapat didjadikan unsur2 daripada suatu kebidjaksanaan umum untuk lebih mempertjepat perkembangan golongan swasta. Tidak dapat diharapkan bahwa tanpa bantuan langsung atau tidak langsung dari Pemerintah perusahaan2 Indonesia akan dapat bersaing dengan perusahaan2 asing yang setjara lebih gampang dapat mengerahkan dana dan daja (+ pengalaman) daripada lingkungan perusahaan dunia.
- 4) Juga dari sudut employment policy pemerintah harus mempergunakan program2 yang dapat meningkatkan daja tahan dan daja berkembang daripada perusahaan2 Indonesia yang sudah ada. Namun, diatas segala pertimbangan ini ada satu alasan utama untuk meng-focus segala perhatian dan usaha pada perkembangan golongan swasta Indonesia.
- 5) Alasan itu ialah bahwa peralihan dari suatu struktur ekonomi kolonial ke ekonomi pertumbuhan modern (modern growth economy) melalui tahap export promotion dan export substitution, kemudian harus melalui tahap pemupukan suatu golongan pengusaha nasional yang dapat menjalankan industrialisasi. Tanpa tahap terakhir ini maka ekonomi akan matjet dalam struktur ekonomi "enclave", yang djuga dapat disebut sisa2 ekonomi kolonial.

### III. MASALAH GOLONGAN TIJENDEKIAWAN

Golongan ketiga yang memerlukan perhatian khusus didalam KEMELITA-II ialah golongan tiendekiawan. Suatu usaha pembangunan yang terus-menerus tidak dapat berhasil jika tidak mendapat dukungan yang entusias dari sebagian yang cukup besar diantara golongan tiendekiawan. Apalagi didalam tingkat2 pembangunan yang lebih complex, program2 pembangunan memerlukan dukungan dari-pada suatu publik yang science-oriented dan development-oriented dan yang kreatif, yang mampu untuk melaksanakan, bahkan memperbaiki dan menambah-nambah pada program2 itu, dan yang sanggup untuk melantjarkan keaktifan tambahan yang memperkuat dan melengkapi program2 pembangunan tadi. Pada lakekatnja setiap pembaharuan, setiap innovation technologis - seperti Bimas misalnja - memerlukan dukungan terus-menerus daripada kalangan para ahli dan tiendekiawan umumnya dalam menilai konsekuensi2 dan mendjalankan follow-up-nja, supaya djangan timbul kematjetan atau akibat2 yang negatif. Semuanya ini sangat perlu untuk menjaga momentum daripada proses pembangunan itu. Namun banjak djugalah para tiendekiawan yang tidak puas, yang menggerutu, yang skeptis dan frustrated. Untuk sebagian hal ini disebabkan kekurangan fasilitas2 research. Untuk sebagian djuga karena mereka merasa tidak diadjak serta didalam pemikiran, perumusan perentjanaan atau pelaksanaan daripada program2 pembangunan. Padahal merekalah yang seharusnya menjadi surber daripada gagasan2 baru dan daripada rentjana2 serta policies alternatif yang diperlukan didalam suatu proses perentjanaan yang lengkap. Tidak dapat diharapkan bahwa Pemerintah akan dapat memanfaatkan potensi2 bangsa setjara optimaal dengan hanya mengemukakan pikiran2 serta gagasan2, yang ada didalam lingkungan apparatuur Pemerintah sadja. Sebenarnjalah tidak terlalu sulit untuk memperbaiki keadaan ini atau setidaknya tidaknja untuk mengurangi sebab-musabab daripada frustrasi itu, jaitu dengan komunikasi dan penglibatan yang lebih sistematis.

#### Keadaan kehidupan intelektual.

Namun yang lebih penting daripada segala itu ialah bahwa boleh dikatakan keseluruhan daripada kehidupan intelektual di Indonesia mengalami stagnasi dan kematjetan. Kematjetan ekonomi dan inflasi yang berketjampak pada akhir zaman ORLA djuga telah menghantjurkan infra-struktur intelektual, yang sampai

sekarang belum juga dibangun kembali. Yang dimaksud disini ialah daerah kehidupan bangsa yang jatuh diantara lingkungan tanggung-djawab P dan K dan daerah lingkup LPI, dan yang barangkali oleh karena itu terbengkalai. Bagaimanapun juga, tidak dapat diharapkan kegairahan dibidang intelektual yang dapat merupakan daya pendorong usaha pembangunan selama jumlah buku2 dan film2 - dari buku2 dan film2 ilmiah, buku2 sekolah sampai kepada buku2 batjaan umum dan buku2 dan film kanak2 yang berorientasi pada pembangunan - tidak diperbesar setjara berarti: selama tidak ada majallah intelektual yang dapat merangsang pikiran2 dan daya kreatif para tjendekiawan, dan yang dapat menjampaikan perkembangan2 terakhir dibidang ilmiah dan pembangunan dari dunia luar. Dan djika diingat bahwa dalam proses pengdewasaan pemuda lebih dipengaruhi oleh batjaan (atau tidak ada batjaan) dan pengalaman di-luar sekolah, daripada didalam sekolah, teranglah bahwa akibat keadaan buku ini, djauh sekali dalam tubuh masyarakat). Tidak adanya "professional journals" Indonesia, jaitu majallah2 vak untuk keahlian2 yang ada di Indonesia, menjadi penghalang besar bagi terwujudnja standard2 profesional, dan tidak memungkinkan pertukaran data dan pengudjian pikiran mengenai research masing2 dan mengenai masalah2 pembangunan pada umumnya.

Perhatian yang harus diberikan

1. Yang sangat diperlukan pula ialah suatu dinas terdjemahan ilmiah, (scientific translation service), yang effectief dan tjukup puas sehingga arus informasi ilmiah yang dapat masuk ke segala bagian Indonesia dapat diperbesar, dan sehingga dengan djalan demikian juga auto-aktivitas dibidang ilmiah dapat dirangsang pula. Ujangan kita harapkan bahwa golongan tjendekiawan Indonesia yang harus bertambah pesat djumlahnja untuk memenuhi keperluan pembangunan masyarakat Indonesia, semuanya akan dapat menguasai bahasa Inggris. Seperti juga telah dilakukan oleh negara2 besar seperti Uni Soviet dan Djepang kita akan harus lebih pentingkan terdjemahan2 (termasuk penjingkatan atau "abstracts" ilmiah setjara besar2an.
2. Salah satu manifestasi lain daripada terlalaikannja "resource intelektual" ini ialah dibidang hukum. Stagnasi didalam reform dan pembaharuan misalnja dibidang hukum dagang, hukum tanah, undang2 perburuhan, hukum patent dan

copyright sekarangpun sudah menghambat momentum pembangunan, atau menjelewengkan arah pembangunan. Sangat diperlukan suatu usaha yang sungguh2 dan tjukup besar pada permulaan KEPELITA-II, agar supaya pembinaan hukum dapat berlaku sesuai dengan keperluan pembangunan kita. Perlu ditambahkan disini bahwa masaalah pembinaan hukum terlalu penting untuk diserahkan kepada golongan ahli hukum sadja. Hendaknja didalam Lembaga Pembina Hukum misalnja diberi tempat untuk orang2 yang mengerti hubungan antara perobahan2 struktur sosial dan sistem hukum, dan yang mengerti perobahan2 sosial mana yang diperlukan untuk melandjutkan pembangunan.

3. Disamping itu perlu diperhatikan djuga pembinaan keahlian2 tinggi serta pemanfaatannya didalam proses pembangunan. Sekarangpun sudah kentara beberapa bidang dimana kekurangan skills kita mendjadi penghambat dalam proses pembangunan. Untuk mentjegah bahwa kekurangan2 sematjam itu akan mendjadi soal yang urgent didalam pelaksanaan KEPELITA-II maka sekarangpun sudah agaknja perlu diadakan identifikasi daripada skills yang perlu kita kembangkan. Dan trainingprograms dalam negeri maupun asing hendaknja diadakan atau dimanfaatkan setjara lebih sistematis untuk mengisi kekosongan2 itu. Djuga masaalah "retraining" perlu diperhatikan, sebagai suatu tjara untuk lebih memperketemukan kemampuan Indonesia dengan kesempatan2 kerdja baru yang muntjul didalam proses pembangunan. Sebenarnja dibeberapa negara lain sudah diperkembangkan lembaga2 yang dapat mendjalankan fungsi2 ini, dan tidak ada djeleknjalah untuk memanfaatkan pengalaman negara2 itu untuk keperluan kita sendiri. (Latin Amerika, Djerman, Skandinavia).

Pokoknja pembangunan nasional sebagai suatu proses perobahan total tidak dapat berdjalan sebagai suatu "selfsustaining process" tanpa disertai, dirangsang dan didukung oleh suatu kehidupan intelektual yang menggairah. Namun kehidupan intelektual ini tidak berkembang dengan sendirinja. Diperlukan suasana yang tepat, adanja infra-struktur yang sesuai, serta garis2 kebidjaksanaan yang setjara integral dengan perantaraan berbagai departemen dan lembaga menu-dju pada pengembangan "intellectual resource" ini sebagai suatu bidang yang khusus, yang tjukup penting untuk diperlakukan sebagai suatu bidang tersendiri, disamping bidang "educational development" dan disamping bidang "science development".

4. Tidak mustahillah bahwa pada suatu ketika akan diperlukan suatu lembaga khusus untuk pengembangan lektuur, film dan mass media serta komunikasi pada umumnya sebagai suatu lembaga autonom disamping LIPI dan sebagainya pada tingkat nasional, dan dibawah Presiden.

#### IV. MASALAH DEMOBILISAN

Golongan berikutnya yang perlu mendapat perhatian khusus didalam REPELITA-II ialah golongan demobilisan, yaitu anggota2 ABRI yang akan dipensiunkan dalam masa REPELITA-II. Persoalan ini terlalu besar untuk dianggap sebagai suatu persoalan yang harus diselesaikan oleh pihak ABRI saja. Budget militer terlalu kecil untuk itu, dan usaha2 non-budgeter pula tidak akan mentjukupi dan mungkin akan menimbulkan komplikasi beramatjam-matjam. Biarpun sudah ada tendentie kearah itu, namun persoalan ini sudah sepatutnya dianggap dan diperlakukan setjara lebih sistematis sebagai suatu masalah nasional.

Penyelesaian harus ditjari dalam rangka usaha pembangunan umumnya, beserta kebidjaksanaan2 dibidang investasi dan employment.

1. "Group settlement" dalam rangka usaha transmigrasi dan extensifikasi pertanian ialah usaha2 yang sudah sepatutnya dijalankan dan memang sudah dijalankan.

2. Disamping itu dibidang training dalam skills baru sebagai persiapan untuk pekerdjaan2 sesudah kariere militer selesai, sehingga dapat dimanfaatkan didalam usaha pembangunan dikota-kota kecil dan didalam pembangunan desa, masih dapat diperkembangkan (ahli mesin, tukang kayu, mobil tukang kulit dan sebagainya). Teknik2 pengadjaran yang diperkembangkan oleh tentara Iran kiranya dapat dimanfaatkan dalam hubungan ini. Para demobilisan ini djuga akan dapat dipakai didalam proses rural mobilisation, tapi sekali ini tidak berdasarkan autoritas formil melainkan karena mendapat training khusus dan berdasarkan kemampuannya untuk mejakinkan orang. Sebenarnya training dan re-training untuk keperluan ini tidak djauh berbeda daripada training didalam lingkungan BUTSI dan pada umumnya rasanya tidak ada djeleknja untuk mengadakan kerdja-sama yang erat antara kedua golongan ini.

3. Didirikannya lembaga2 penempatan tenaga kerdja yang bergandengan dengan "business-information centers" yang dibitjarakan dalam rangka pengembangan swasta, djuga dapat dipergunakan untuk menghubungi perwira2 senior dengan kesempatan2 baru yang timbul dari investasi baru.

Perlu ditambahkan djuga bahwa penampungan dan penempatan demobilisan sebagai usaha nasional djuga dapat merupakan satu langkah lebih maju kearah penju-  
sunan suatu anggaran belandja negara yang riisel, yang sungguh2 mentjerminkan semua pengeluaran dan pendapatan negara. Pada achir REPILITA-II agaknya tu-  
djuan ini sudah harus dapat ditjapai agar supaya dana2 bangsa dapat diguna-  
kan setjara optimaal.

#### V. BIROKRASI PEMERINTAH

Makin lama makin telah menjadi terang bahwa "limiting factor" atau faktor yang membatasi ladjnja pembangunan ialah birokrasi pemerintah. Hal ini memang sudah disadari dan berbagai tindakan untuk memperbaiki keadaan telah mulai diambil. Agaknya pokok persoalan ialah sampai dimana kenaikan gaji akan menaikkan efficiency, dan bagaimanakah komposisi daripada birokrasi itu dapat diperbaiki: apakah perlu untuk menaikkan gaji semua pegawai atau untuk menaikkan gaji setjara lebih selektif lebih dahulu. Teranglah bahwa suatu kenaikan gaji umum tidak akan dapat mengatasi "inefficiency2" yang telah demikian lama berakar didalam sistem birokrasi kita, dan tidak akan dapat merubah komposisi berat sebelah, jaitu relatif terlalu banyak pegawai unskilled. Satu djalan keluar yang dapat dipertimbangkan ialah djikalau dibawah wewenang setiap menteri dibentuk lembaga2 autonom yang disertai pelaksanaan suatu poli-  
tik pembangunan tertentu, dan yang diisi oleh tenaga ahli muda yang bersama stafnja diberi gaji yang realistis. Demikianlah lembaga2 ini dapat menjadi titik-tolak daripada usaha peningkatan efficiency dan prestasi kerdja berdasar-  
kan suatu peraturan kepegawaian baru. Berpangkal daripada lembaga2 ini maka berangsur-angsur sebagian besar daripada birokrasi pemerintah dapat ditingkatkan efficiency-nja dan gadjinja dinaikkan pada niveau yang realistis. Dengan djalan ini maka dapat diharapkan terwujudnja suatu apparatuur pemerintah yang pertama-tama "development-oriented" dan yang selain dari itu, efficient dan efektif.

### Perusahaan Negara

Jalam menghadapi REPLITA-II hendaknya djuga diberi perhatian khusus kepada para pegawai perusahaan Negara.

1. Pertama, akan mendjadi perlu untuk merumuskan peranan jang menurut Pemerintah harus dimainkan oleh PN2 atau PT2 Negara dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sudah pastilah bahwa sektor swasta Indonesia dalam keseluruhannya, jaitu termasuk golongan pribumi maupun golongan keturunan asing, tidak akan mentjukupi sebagai wahana satu<sup>nja</sup> untuk memperkembangkan bidang usaha "business" Indonesia. PN2 dan PT2 Negara hendaknya mendjadi alat Pemerintah untuk mendjamin arah maupun lajunya perkembangan sektor Indonesia (luar asing). Demikian djuga PN2 dan PT2 Negara dapat mendjalankan perubahan struktur kekuasaan ekonomi di Indonesia dan bersama dengan golongan swasta merupakanimbangan jang tjukup kuat terhadap perusahaan2 asing di Indonesia. Kegagalan PN2 dizaman UKLA untuk mendjadi badan2 usaha jang efficient dan rendabel tidak berarti bahwa kelemahan2 didalam performance mereka itu semuanya inherent pada type perusahaan ini, dan tidak dapat diatasi. Agaknja tjampur-tangan dan kekangan oleh birokrasi kementerian, kekurangan autonomi, besar ketjilnja perusahaan dan pilihan management merupakan faktor2 utama dalam hal ini.
2. Disamping itu djikalau Pemerintah memang setjara sungguh2 hendak meningkatkan efficiency dan effektivitas daripada PN2 (dan tidak lagi memperlakukannya sebagai sapi perahan untuk keperluan "vested interests" didalam kementerian), maka hendaknya dipertibangkan supaja kepada management, staf dan pegawai PN2 dan PT2 Negara diberi suatu status administratif tersendiri, berlainan dengan status pegawai negeri biasa. Djikalau dalam sistem kepegawaian negeri lamanya kerdja sebagai pegawai negeri (senioritas) dan ketjaka-  
an untuk tidak membuat kesalahan, merupakan faktor2 utama dalam menentukan kenaikan pangkat, maka untuk perusahaan negara sebenarnya diperlukan ukuran2 lain untuk mendjamin efficiency jang tinggi. Jang diperlukan ialah ketjakaan, kemampuan untuk mengambil keputusan dan kesediaan mengambil risiko jang dapat dipertanggung-djawabkan. Security dan promotie ditentukan oleh hasil usaha dan bukan oleh pertlibangan jang hati2 supaja djangan membuat kesalahan karena ketjepatan dalam decision-making tidak begitu dipentingkan. Dengan status ter-

ter sendiri maka para pegawai perusahaan2 negara dapat digadji dan diperlakukan - dalam hal pemberhentian, pensiunan dan promotie - sebagai golongan swasta. Memang untuk mentjapai efficiency jang seperlunya maka djarak antara pegawai perusahaan negara dengan golongan swasta seharusnya lebih ketjil daripada dengan golongan pegawai negeri biasa. Maka demikianlah para pegawai perusahaan2 negara dan golongan swasta Indonesia dan terutama golongan management-nja dapat dianggap dan diperlakukan sebagai satu "pool" tunggal daripada kemampuan dan potentie bangsa dibidang perusahaan ("entrepreneurial pool") dimana unsur2nja dapat pindah-memindah bebas antara lingkungan swasta dan lingkungan perusahaan negara. Demikian pula pemerintah dapat menarik manfaat daripada pengalaman dan kemampuan swasta dimana perlu, dan sebaliknya.

3. Sebagai akibat logis daripada konsepsi ini maka sebaiknya para pekerdja perusahaan2 negara diberi kesempatan untuk menjusun sarekat2 sekerdjania sendiri. Didirikannya KORPRI2 didalam perusahaan2 negara hanya akan memperkuat tendens birokratisasi daripada perusahaan2 ini jang akan menurunkan efficiency dan kemampuan kommersiilnja; padahal konsepsi jang digambarkan diatas ini berketudjuan de-birokratisasi demi efficiency.

#### VI. KEADILAN SOSIAL

Suatu permasalahan jang tidak mudah dapat dipastikan tempatnja didalam sistem penggolongan masyarakat, karena ia mempengaruhi bermatjam-matjam golongan ialah masalah keadilan sosial. Pula persoalan ini menjelma dalam berbagai bentuk dan mempengaruhi berbagai persoalan lain. Ia ada sangkut-pautnja dengan tjara2 hidup beberapa gelintir manusia jang memamerkan kemewahannya, dengan perbedaan jang makin djauh antara jang kaya dan jang miskin pada umumnya, baik dikota-kota maupun didesa-desa (sebagai akibat kommersialisasi dan modernisasi pertanian): ia berhubungan dengan tidak tjukup luas dan meratanya beban pajak serta tidak adanya protektie terhadap pemerasan oleh sementara pegawai2 pajak, tapi <sup>dia</sup> juga berhubungan dengan kurangnya kepastian hukum (rechtszekerheid) ditambah dengan akibat2 negatif daripada kelelahan keuangan pada para hakim dan la-bannya djalannya proses peradilan. Tidak mengherankanlah djikalau keprihatinan tentang keadilan sosial ini paling tampak pada para mahasiswa karena mereka diliputi kekutiran bahwa selesai sekolah

tidak akan ada kesempatan kerja bagi mereka.

Pada pokoknya masalah keadilan sosial itu bukan suatu masalah yang dapat diatasi dengan menggunakan suatu rumus tertentu.

Sebab2 timbulnya masalah keadilan sosial a.l.

1. Banyak akan tergantung dari matjam2 imbalan, dan daripada rasa adil, rasa wajar dan pantas yang terdapat didalam suatu masyarakat.
2. Ia juga tergantung dari imbangan beban dan kesempatan antara pusat dan daerah, antar-daerah, antara elite dan massa, antara kota dan desa, dan antara kota besar dan kota2 kecil.
3. Disamping itu tetap terbukanya kesempatan setjara merata ("equal access to opportunity") dalam menempuh kemajuan ekonomi umum sangat penting untuk memelihara rasa keadilan sosial. Jika yang lemah dan yang miskin misalnja merasa tidak mendapat kesempatan yang lajak seperti yang terbuka bagi golongan yang berkuasa dan yang kaya, untuk misalnja mengirim anak2nja kesekolah, atau untuk mendapat rumah atau untuk masuk rumah sakit, maka hal itu akan dirasakan sebagai ketidak-adilan.

Demikianlah pelaksanaan SP2 dibidang pendidikan memerlukan dengan segera pengadaaan bea-siswa dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan dictum peraturan itu sendiri, agar supaya tidak timbul perasaan bahwa hanya anak2 orang kaya mendapat kesempatan untuk belajar.

4. Sjarat lain lagi ialah, persamaan dalam mendapat perlindungan hukum dan peradilan. Khususnja mengenai hak tanah, hal ini ternyata menjadi suatu ukuran utama yang mempengaruhi rasa keadilan didalam masyarakat. Sebagai akibat landreform tanpa peningkatan kemampuan pengregistrasian pemindahan hak milik tanah seperlunya, maka soal milik tanah terutama di Djawa paling katjau. Menurut keterangan akan diperlukan 200 tahun untuk membereskan registrasi ini jika kemampuan kantor registrasi agraria ini tidak diperbaiki. Keadaan sematjam ini dengan sendirinja merupakan suatu kesempatan yang mudah untuk segala matjam penipuan dan penyalah-gunaan kekuasaan. Lebih lagi karena kemajuan ekonomi telah memungkinkan orang2 kota untuk membeli tanah didaerah pedesaan. Hal ini telah menimbulkan gejala "absentee landownership" yang baru yang cukup luas,

meskipun sampai sekarang tidak diketahui berapa luasnya gejala baru ini. Sangat bisa jadi akan menjadi perlu untuk mengendalikan tendensi ini dalam rangka REPELITA-II.

Memang sulit benar untuk mengidentifikasikan disektor-sektor mana dalam proses pembangunan segi keadilan-sosial ini harus diperhatikan. Meskipun demikian sebaiknya pada tingkat permulaan dalam proses perentjanaaan sasaran keadilan sosial dipegang teguh dalam merumuskan prinsip2 yang akan melandasi REPELITA-II

Kemudian setelah ditjapai tingkat perentjanaaan dimana efek kuantitatif daripada program2 pembangunan dapat diperhitungkan, policies itu dinilai sekali lagi - dan jika perlu dikoreksi - dari sudut keadilan sosial. Sebenarnyalah dalam bentuk lain masalah keadilan-sosial sudah timbul pada permulaan proses planning, sebab setelah ditentukan kira2 berapa persen daripada pendapatan nasional ditudjukan untuk akumulasi modal dan kira2 berapa persen untuk konsumsi, maka pertanyaan kedua yang harus dijawab ialah golongan sosial mana akan mendapat bagian apa daripada pendapatan nasional ini menurut rentjana yang bersangkutan.

Memang termasuk bidang "social planning" untuk menanjakan golongan mana, group mana, yang mendapat keuntungan daripada kemajuan ekonomi, berapa andil masing2 group atau golongan dalam pendapatan nasional, dan group2 atau golongan mana yang dalam tahap berikutnya perlu diperhatikan untuk memperluas landasan bagi pembangunan seterusnya. Usaha pembangunan yang dianggap terlalu sempit karena menguntungkan hanya segolongan ketjil disuatu bidang tertentu pasti akan dirasakan sebagai tidak adil.

Lagi pula pengalaman pahit daripada Pakistan menunjukkan bahwa jika persoalan ini tidak tjukup pagi diperhatikan, maka bisa jadi pada suatu ketika golongan2 dan group2 yang pertama-tama mendapat keuntungan itu menjadi demikian kuat kedudukannya sehingga kebijaksanaan2 untuk mengkoreksikan djurusan perkembangan seterusnya tidak lagi dapat didjalankan. Akibatnya ialah petjahnja solidaritas nasional, dan akhirnya hantjurnja sistem politik yang bersangkutan. Seperti diketahui, salah satu sebab daripada jatuhnya Ajub Khan dahulu ialah karena dia tidak dapat mentjegah konsentrasi kekuasaan

ekonomi dalam tangan 20 keluarga, semuanya di Pakistan Barat.

Terganggunja rasa keadilan-sosial didalam masyarakat juga merupakan antjaman untuk rasa solidaritas nasional. Padahal, usaha pembangunan kita masih akan memerlukan waktu yang sangat lama sebelum kemajuan kita akan dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat, dan akan disertai oleh persoalan2 yang demikian besar, seperti kepadatan penduduk, unemployment, masalah pemuda, soal urbanisasi yang tidak terkendalikan, sehingga tanpa pemupukan solidaritas nasional setjara sadar, maka kemampuan kita untuk meng-"manage" setjara rasional masalah2 yang besar ini tidak akan rentjukupi. Maka akan timbul situasi2 yang explosief yang mengantjam keamanan dan persatuan bangsa. Rasa solidaritas nasional yang merupakan ikatan antara semua golongan, antara yang kaya dan yang miskin itulah yang merupakan bekal kita yang paling utama dalam perdjalanannya kita menudju ke masyarakat adil dan makmur. Maka yang sangat akan diperlukan ialah suatu kewaspadaan terus-menerus terhadap gejala2 yang dapat merusak rasa keadilan-sosial dan solidaritas nasional ini, agar supaya tjepat2 dapat dilaksanakan policies korektif untuk mengitbangi situasi2 sematjam itu. Tapi bagaimanapun juga, lepas dari segala peraturan2 yang berketudjuan untuk mengurangi perbedaan2 yang menjolok, banyak sekali akan tergantung daripada kesediaan dan kesanggupan golongan elite, golongan kaya dan berkuasa untuk menahan diri - setjara sukarela, untuk membatasi diri dalam menggunakan kesempatan untuk menggaruk-garuk kekayaan pribadi dan untuk menonjol-nondjolkan kekayaan itu ("conspicuous consumption"). Sangat perlu mereka memberi tjontoh dalam bertirakat terus, demi rasa solidaritas nasional itu, atau paling sedikit karena menjegani dan menghormati kemelaratan rakyat banyak. Masalah keadilan sosial didalam pembangunan juga menundjukkan bahwa tidak cukup kita hanya melihat pada golongan dan group2 sosial yang perlu diperhatikan dalam persiapan REKALITA-II, melainkan bahwa kita harus melihat lebih djauh, jaitu kepada masalah struktural, masalah organisasi sosial, dan akhirnya masalah ekonomi politik (political economy), agar supaya momentum pembangunan dapat dipelihara dan agar pengamanan daripada pembangunan terus terdjamin. Ketiga2nja juga termasuk tudjuan2 pembangunan dibidang sosial ("social goals")

## VII. PEMBANGUNAN DAERAH

Adapun kategori pertama, masaalah hubungan pusat daerah agaknya diantara masaalah2 terpenting. Tanpa ketentuan tentang hal ini dalam segala aspeknya maka perentjanaaan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan. Maka matjetnja Kantjangan Undang2 tentang Imbangan Keuangan Pusat-Daerah sebenarnya membuka suatu kesempatan baik untuk menindjau kembali seluruh masaalah ini dan untuk menilainja bukan sadja dari segi keperluan routine administratif, melainkan terutama dari segi keperluan pembangunan. Dalam menindjau kembali persoalan ini, mau tak mau pandangan kita mengenai Indonesia matjam apa jang kita idamkan, serta pertimbangan2 mengenai "overall growthrate" dan pertimbangan2 mengenai djurusan dan sifat pembangunan jang hendak kita kedjar memegang peranan jang penting disini.

Persoalan politis jang harus dihadapi ialah, pembangunan daerah sematjam apa jang dapat mentjegah pengulangan daripada persoalan RKRI, karena daerah dilalaikan. Dan sebaliknya pembangunan sematjam apa dapat mentjegah bangkitnja tendensi sentrifugal jang achirnja djuga akan mengantjam kesatuan Indonesia. Demikian pula pembangunan pedesaan, termasuk usaha2 modernisasi dan diversifikasi pertanian, perlu tidaknja mekanisasi, pengintegrasian "internal markets", dan usaha2 untuk mengatasi masaalah employment, tidak akan dapat dihadapi setjara konsekwen djika tidak lebih dahulu ditentukan pada azasnja pembagian dana2 pembangunan antara kota dan pedesaan. Disini tersangkut djuga garis kbidjaksanaan tentang penempatan industri. Sampai dimana prinsip efficiency harus dibolehkan menentukan segala-galanja, sehingga industri achirnja umumnja dipusatkan dikota-kota besar sadja, atau sampai dimana perhitungan2 berdasarkan prioritas sosial, jang mungkin akan dapat melambatkan ladjunja pertumbuhan ekonomi - setidaknya untuk sementara waktu - harus turut diperhitungkan.

## VIII. AUTO-AKTIVITAS MASJARAKAT SENDIRI

Kategori kedua berkisar pada persoalan: setjara bagaimana masjarakat Indonesia harus menjusun diri, harus mengorganisir dirinja untuk REPELITA-II itu. Teranglah agaknya bahwa untuk masa REPELITA-II usaha pembangunan akan

memerlukan banyak auto-aktivitas masyarakat sendiri. Tidak dapat diharapkan bahwa sasaran2 REPELITA-II akan dapat ditjapai djika diserahkan kepada usaha apparatuur dan birokrasi negara sadja. senantiasa perlu didjaga supaya ketjenderungan jang "natuu-lijk" daripada suatu birokrasi untuk mengbirokratisir segala-galanja, djustru didalam tahap pembangunan jang lebih complex diten-tang. Hal ini memang djuga sesuai dengan ketentuan PKS tentang debirokratisasi dan dekonsentrasi. Maka didalam usaha mobilisasi pedesaan untuk pembangunan misalnja perlu didjaga djangan sampai setjara sengadja atau tidak disengadja birokratisasi proses pembangunan itu terdjadi.

Pertama, perlu disadari dalam mempersiapkan diri untuk REPELITA-II bahwa pengerahan "floating mass" untuk PEMILU jang akan datang merupakan suatu hal jang berlainan sekali daripada penjusunan dan mobilisasi tenaga untuk usaha pembangunan desa. Kedua, usaha ini lain sasarannja, lain sifatnja dan memerlukan type leadership jang berlainan pula. Pendeknja, suatu slagorde untuk PEMILU tidak akan dapat melaksanakan usaha2 pembangunan. Pada tingkat pedesaan usaha pembangunan sebenarnja meliputi berbagai keaktifan jang berbeda-beda: peningkatan produksi (pertanian), diversifikasi keaktifan ekonomis (peternakan, perikanan, keradjinan rakjat dan "intermediate technology") beserta marketing, dan ketiga, pembangunan dan pemeliharaan infra-struktur serta usaha2 seperti reboissasi dan sebagainya.

bidang pertama dan kedua memerlukan keberanian untuk mengadakan inovasi, menggunakan teknologi baru, meningkatkan produktivitas, pengertian, per-hitungan laba-rugi daripada masing2 petani jang akan mempengaruhi tindakan2nja, termasuk keputusannja berapa dia akan menabung dan berapa dia akan menginves-tasi kembali. Keaktifan ketiga memerlukan pengerahan tenaga setjara disipliner dan terpinpin, dan suatu organisasi seperti KONGMI dapat berguna disini. Keaktifan jang pertama dan kedua memerlukan pemupukan organisasi2 seperti koperasi produksi, credit-unions, koperasi pendjualan, jang tidak dapat di-pekaskan dari atas melainkan kanja dapat tumbuh berdasar kepertjajaan dan ke-mampuan kollektip daripada rakjat desa. Perintah dari atas sadja ataupun desakan daripada KONGMI desa tidak akan dapat menghidupkan suatu koperasi.

Maka langkah baiknya jika periode bebasnya daerah pedesaan daripada ke-  
aktifan parpol2 ini dimanfaatkan - menjelang REPELITA-II - untuk menjusun  
desa tidak saja atas dasar keperluan PEMILU, melainkan juga atas dasar ke-  
perluan pembangunan itu sendiri, dengan menggunakan kesempatan ini untuk  
merangsang auto-aktivitas para petani, dan dengan mendirikan koperasi2 dan  
sebagainya. Pembentukan "unit2-desa" memang wadah untuk menampung keperluan  
itu. Untuk keperluan PEMILU maka tidak akan perlu lagi suatu "floating mass"  
digiring, melainkan organisasi2 pembangunan itulah yang setjara sadar akan  
memberi suara untuk melanjutkan usaha pembangunan mereka sendiri itu.  
Pada pokoknya, melihat batas2 daripada efficiency dan efektifitas apparatuur  
Pemerintah, maka makin lama makin lebih banyak mobilisasi dana dan daya untuk  
usaha pembangunan didalam tahap kedua ini akan harus dikerdjakan oleh masja-  
rakat sendiri. Hal ini berarti andjuran untuk mendirikan "voluntary Association".  
Perkumpulan2 sekolah, perkumpulan klinik dan rumah sakit, tapi juga sarekat2  
sekerdja, (berdasarkan suatu undang2 baru yang disesuaikan pada keperluan  
pembangunan) koperasi dan credit-unions. Hal ini juga memerlukan suatu peng-  
luasan daripada sikap Pemerintah sehingga disamping focus keamanan (termasuk  
pengamanan politik dan PEMILU), keperluan organisatoris daripada pembangunan  
dengan segala risikonja diterima sebagai focus usahanya pula.  
Dalam beberapa hal, seperti dalam hal sarekat sekerdja, mungkin diperlukan  
perundang-undangan baru, namun djikalau dilihat dari sudut ini maka organisasi2  
sukarela dapat menjadi sarana pembangunan, sarana modernisasi, dan pula sarana  
pengdewasaan rakjat dan demokratisasi masyarakat Indonesia.

Bitjara tentang auto-aktivitas masyarakat yang perlu ditingkatkan  
dalam rangka REPELITA-II maka perlu juga kita perhatikan bidang perumahan,  
gedong2 sekolah dan gedong2 rumah-sakit. Sebaiknya perumusan didalam REPELITA-II  
mentjerminkan kesadaran Pemerintah mengenai urgensi masalah ini, tapi juga  
memuat ketentuan2 yang menggambarkan batas2 kesanggupan Pemerintah dibidang itu.  
Teranglah bahwa pada fase REPELITA-II Pemerintah tidak dapat memikul beban  
untuk suatu "housing program" yang besar. Peranan Pemerintah hendak ja dipusa-  
kan kepada research and development daripada prototype2 perumahan murah (dengan

bahan2 lokal), yang dapat ditjontoh oleh masjarakat. Yang lebih penting lagi ialah suatu penjelidikan yang sistematis tentang sampai dimana berbagai peraturan2 pemerintah pusat maupun lokal diberbagai tempat di Indonesia merintangi perkembangan yang sehat dibidang pembinaan perumahan dan sebagainya, dan sampai dimana kebidjaksanaan2 baru termasuk misalnja lembaga2 kredit perumahan dapat diadakan untuk merangsang keaktifan masjarakat dibidang ini.

#### IX. PERSOALAN "EKONOMI POLITIK"

Marilah kita sekarang meningkat kepada persoalan ekonomi politik, (political economy") serta tudjuan2 pembangunan yang menjangkut bentuk dan susunan masjarakat, yang perlu ditjerminkan didalam REP ELITA-II. Barangkali sebaiknja kita menoleh sebentar kekota Djakarta sebagai manifestasi yang paling menonjol daripada kemadjuan yang telah kita tjapai.

Tidak sulit dimengerti djika madjunja Djakarta telah menimbulkan matjam2 pertanyaan dihati orang banjak diantara pertanyaan2 itu ada yang wadjar dan ada yang tidak. Pertanyaan2 misalnja yang bangkit dari suatu alam pikiran yang kolot dan puritan tidak perlu dilajani didalam karangan ini. Namun ada djuga pertanyaan2 yang perlu didjawab didalam REP ELITA-II, agar supaja REP ELITA-II itu dapat dukungan yang tjukup didalam pelaksanaannja. Pertanyaan2 ini berkisar disekitar arah-djurusan dan sifat daripada usaha pembangunan kita, tudjuan2 pembangunan dan nilai budaja yang mendjadi patokan didalam usaha pembangunan itu. Bersangkutan dengan hal2 ini ialah pertanyaan2 mengenai pola dan tingkat konsumsi yang sekarang telah berkerbang di Djakarta, dan mengenai kerangka sosial daripada proses pembangunan. Apakah tingkat dan pola konsumsi Djakarta sekarang ini tidak terlalu tinggi, yang djika diulangi dikota-kota lain akan merupakan beban yang terlalu tinggi pada neratja pembajaran kita? Apakah pola dan tingkat konsumsi itu tidak menimbulkan harapan2 terlalu tinggi pada pemuda2 dan rakjat kita pada umumnja? Apakah dihari depan Indonesia harus dibayangkan bukan 1 Djakarta, melainkan 20 atau 50 Djakarta? Apakah tudjuan ini mungkin ditjapai, dan - yang lebih penting - apakah tudjuan ini suatu tudjuan yang tepat untuk pembangunan kita?

Bukankah akan timbul suatu djurang perbedaan dan pertentangan antara yang kaya

dan jang miskin? Sudah barang tentu perbedaan dalam tingkat kekajaan tidak sama sekali dapat dielakkan, melihat geografi dan struktur masyarakat Indonesia, namun bagaimanapun juga REPELITA-II hendaknja mentjerminkan suatu kesadaran mengenai masalah ini serta suatu kesediaan untuk mendiaga supaya persoalan ini tidak melampaui batas2 jang dapat merusak solidaritas nasional. Kemadjuan ekonomi Djakarta jang sangat menonjol ini djuga telah menimbulkan suatu pertanjaan lain jang tak kurang pentingnja dihati orang banyak.

Pertanjaan itu ialah apakah kita sedang mengedjar pertumbuhan ekonomi didalam rangka status quo sosial, artinja didalam rangka struktur ekonomi kolonial, atau paling tidak, didalam rangka suatu ekonomi "enclave", ataukah kita ke-  
edjar pertumbuhan economy itu dalam rangka perubahan struktural menudju ke  
terwujudnja suatu ekonomi bertumbuh jang modern ("modern growth economy")?

#### Sistematik REPELITA-II

1. Maka sangat pentinglah dalam merumuskan REPELITA-II, untuk setjara tegas mengutarakan dan meperintjikan tudjuan2 pembangunan serta siyasat pembangunan jang akan dipakai untuk mentjapai tudjuan2 tadi itu, termasuk tahap2 dan perubahan2 struktur sosial jang akan harus dilalui.
2. REPELITA-II djuga perlu mengadakan penilaian sudah sampai dimana kita sekarang dengan berpedoman pada REPELITA-I, dan dimana setjara tidak di-  
sengadja telah timbul gejala2 jang tidak sesuai dengan tudjuan2 pembangunan kita.
3. Dalam hubungan itu maka djuga dapat diqariskan kebidjaksanaan2 untuk mengimbangi atau mengoreksi gejala2 itu.
4. Disamping itu perlu didjawab pertanjaan apakah djurusan pembangunan kita sekarang ini akan membawa kita pada suatu imbanan jang sehat antara industri, pertanian, pemerintah, sektor asing, sektor pribumi dan sektor keuangan. Apabila dengan djalan demikian ini tudjuan2 pembangunan serta tempat kita seka-  
rang berada dan sasaran2 berikutnya telah mendjadi terang, maka lebih mudalah bagi rakyat banyak untuk menerima dan mengidentifikasikan dirinja dengan REPELITA-II itu dan untuk memberi dukungan sepenuhnya. Gambaran itu djuga ber-  
manfaat sebagai "guidelines" bagi inisiatip2 spontan dan keaktifan sukarela di-  
dalam lingkungan masyarakat umum jang sedjalan dan bersifat memperkuat gerak

madjunga daripada usaha pembangunan kita. Maka gambaran tentang masyarakat yang akan kita tudju akan memberi pengarahannya umum dan akan memudahkan pengedaran dana dan daja pada urumnja.

Lebih lagi djika gambaran itu didiskusikan dan disebarkan pengetahuan dan pengertiannya oleh Departemen Penerangan, mass media dan sistem pendidikan baik didalam lingkungan sekuler, maupun didalam lingkungan agama, baik sebelum maupun sesudah perumusan REPELITA-II terakhir.

Dari uraian diatas ini teranglah pula betapa pentingnya nada dan gaya bahasa serta phraseologi yang akan dipakai didalam REPELITA-II, khususnya didalam kata pendahuluannya, jaitu tempat untuk pernyataan umum tentang tudjuannya, tentang siasat, tjara dan pentakapannya.

Dalam hubungan ini agaknya perlu dikemukakan bahwa tidak tepat, tidak bermanfaat dan malahan "counterproductive" untuk menggambarkan seolah-olah didalam 25 tahun kita sudah akan menjapai tingkat kehidupan materiel daripada sementara negara industri. Kita harus menyadari - dan kesadaran itu perlu ditanam didalam masyarakat kita - bahwa 25 tahun dari sekarang kita masih akan merupakan suatu negara yang miskin, juga apabila kemajuan yang telah kita tjapai tjukup mengesankan. Bahkan persoalan yang paling penting pada phase pembangunan itu - melihat permasalahan itu di Latin Amerika, - ialah bagaimana kita tjegah timbulnya suatu elite yang hidup pada tingkat kemewahan tropah, seolah-olah negaranya sudah kaya, yang menjimpanya hartanya diluar negeri dan tidak bersedia menanamnya didalam negerinya sendiri. Pendapatan per capita dinegara-negara Latin Amerika - rata2 \$ 350.00, tapi inilah persoalannya yang mengakibatkan kemacetan sosial, hanturnya solidaritas nasional dan pertentangan bersendjata. Kita, sebaliknya, hendaknja menegaskan perlunya - dengan segala kemajuan yang telah ditjapai - perlunya kita tetap kerdja keras, tetap berkorban, dalam arti tidak menghabiskan segala kemajuan untuk konsumsi, tetap hidup sederhana, dengan sengaja mengelakkan kemewahan yang menonjol, dan tetap mengutamakan produksi.

Seperti sudah dikemukakan lebih dahulu, pandangan yang dikemukakan disini bersifat sangat sementara, dan impresionistis. Lagi pula, tidak semua persoalan yang disebut ini merupakan persoalan yang baru bagi pemerintah.

Diberbagai bidang memang sudah ada policies yang dapat melandasi kebijaksanaan seterusnya. Penelaahan pandangan2 dan gagasan2 ini hanya untuk menggoreskan suatu perspectief penglihatan dalam mempelajari persoalan2 Indonesia dibidang sosial/budaja.

Sudah barang tentu harus ditanya apakah benar perintjian daripada persoalan2 yang dikemukakan ini, dan apakah benar urutan prioritasnya. Apa tidak ada persoalan lain yang urgent yang tidak terbahas disini. Disamping itu, perlu pula untuk mempelajari, djikalau analisa ini ada benarnya, bagaimanakah gagasan2 disini dapat dibuat operasionil, dan setjara bagaimana, dan pada tingkat apa persoalan2 yang disinggung ini dapat dimasukkan kedalam proses planning.

Perkembangan di minggu-minggu yang achir ini telah menundukkan kepada satu masaalah yang akan makin lama makin penting dan memang memerlukan penampungan dari segi policy maupun penglembagaan, dan yang barangkali ada baiknya untuk dibahas djuga sedikit.

Masaalah itu ialah masaalah kommunikasi, chususnja komunikasi antara para peserta dan pendukung usaha pembangunan kita, jaitu mereka yang dapat disebut dalam bahasa Inggeris: "development-community" di Indonesia.

Harus dianggap sebagai sesuatu yang lumrah djikalau diantara anggota2

community ini kadang kala terdapat perbedaan pendapat didalam rangka REPELITA-I atau REPELITA-II tentang prioritas, sifat atau tjara pelaksanaan daripada suatu projek tertentu. Yang penting ialah bukannya bahwa perbedaan paham itu terdjadi, melainkan bahwa perbedaan pendapat itu tidak rendjadi persoalan politik, yang setiap kali dapat berlarut mendjadi persoalan yang dapat menjangkut atau membahayakan kedudukan dan gengsi Pemerintah. Maka yang diperlukan ialah suatu kerungkinan yang sjah untuk mengadakan diskusi terus-menerus bukan saja tentang masaalah2 seperti itu, tapi tentang semua persoalan pembangunan djustru untuk mentjegah timbulnja perselisihan paham berdasarkan salah-paham atau kurang informasi. Dan djikalau perbedaan pendapat ternjata berdasarkan perbedaan policy yang djudjur, supaya hal itu mendjadi terang dan dapat ditampung. Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk dikerdjakan dalam hubungan ini.

Pertama, BAPRENAS mengeluarkan suatu madjallah tentang masaalah pembangunan yang isinja tidak mengikat pada dirinja, namun yang karangan2nja mengandung gagasan2 yang patut diketahui oleh siapa sadja yang berkepentingan dalam usaha pembangunan Indonesia. Ujadi selain alat komunikasi djuga alat pendidikan umum. Madjallah ini hendaknja djuga memuat karangan2 orang diluar lingkungan

BAPRENAS, agar supaja gagasan2 dari segala pendjuru dapat dinilai dan djika pantas, dimanfaatkan. Agar supaja pula berbagai gagasan dapat diudji diforum professional dan umum, dan pyar dengan demikian mendjadi lebih terang penger-tian Development Community Indonesia tentang proses dan usaha pembangunan kita dalam segala kompleksitasnja. Disamping itu dapat djuga dipertimbangkan suatu madjallah pembangunan yang ditudjukan kepada para pemimpin desa seluruh Indonesia.

Kedua, didirikannya suatu lembaga sematjam Lemhanas untuk pembangunan pada tingkat nasional, tapi djuga pada tingkat provinsi, seperti telah dikemukakan dalam pemitjaraan tentang pengembangan golongan swasta, dapat bermanfaat dalam persoalan ini djuga. Turut-sertanja para mahasiswa dalam seminar2 lembaga ini disamping unsur2 apparatuur Pemerintah sipil dan militer, swasta, anggota Parlemen, buruh dan koperasi, akan dapat mengatasi salah pengertian dan prasangka dan memupuk keserasian yang akan dapat mempertjepat ladjnja pembangunan. Hal ini memang terbukti di negara seperti Colombia. Didalam lembaga ini pula perbedaan pendapat tentang pembangunan yang dapat menimbulkan issue politik dapat di-"spot" dan dapat dihadapi sebelum issue2 itu mendjadi issue politik.

Djakarta, 6 Januari 1972

B A P R E N A S